

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desentralisasi atau dikenal juga sebagai otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengurus ‘rumah tangga’-nya sendiri telah membawa dampak yang cukup signifikan pada lembaga politik dan kebijakan publik di Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini berdampak pada bentuk kerja sama yang menjadi lebih beragam jika dibandingkan dengan era sentralistik pada masa Orde Baru. Pemerintah daerah tidak hanya bisa melakukan kerja sama antar pemerintah daerah di dalam negeri, melainkan dengan pemerintah daerah di luar negeri.<sup>2</sup> Dengan kata lain, melalui otonomi daerah, pemerintah daerah sekarang muncul sebagai aktor yang dapat melakukan aktivitas hubungan internasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama yang bersifat internasional dengan pemerintah di negara lain yang setingkat, baik karena alasan sejarah maupun potensi yang terdapat di wilayahnya.<sup>3</sup>

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri ini biasa disebut *sister province/sister city*. Di Indonesia, kerja sama *sister province/sister city* ini lumrah dilakukan oleh berbagai

---

<sup>1</sup> Tonny Dian Effendi, “Review of Sister Province between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan,” *Andalas Journal of International Studies*, 3.2 (2014), hal. 103.

<sup>2</sup> Masrohaturun, “Implementasi Kebijakan Kerja sama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah,” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6.1 (2018), hal. 49–62 (hal. 49), doi:10.30656/sawala.v6i1.567.

<sup>3</sup> Tonny Dian Effendi, *Loc. Cit.*, hal. 103

daerah. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 9 Tahun 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.<sup>4</sup>

Menurut matriks kerja sama *sister province* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada sejumlah 52 kerja sama *sister province* yang dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia sampai bulan Oktober 2021, dan bertambah 16 kerja sama pada bulan Desember 2021.<sup>5</sup> Kerja sama dalam kerangka ini sudah sangat banyak di Indonesia. Masrohatun<sup>6</sup> menyebut lebih dari 200 bentuk kerja sama telah dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia, baik dalam bentuk kerja sama *sister province* maupun *sister city*.

Terbukanya kesempatan ini memungkinkan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk turut serta dalam tren pembangunan daerah melalui pelaksanaan paradiplomasi sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Paradiplomasi inilah yang terus dilakukan oleh Pemerintah NTB sejak kepemimpinan sebelumnya. Namun, menurut Pratama<sup>7</sup> terdapat perbedaan fokus dari program paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah NTB pada setiap periode kepemimpinan. Pada masa kepemimpinan Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) (2008-2013; 2013-2018), fokus dari

---

<sup>4</sup> Masrohatun, *Loc.Cit.*, hal. 50.

<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Matriks Kerja Sama Sister Province Indonesia dengan Mitra Negara ASTIM Per 10 Oktober 2021* (2021) <<https://pug.kemlu.go.id/produk>>.

<sup>6</sup> Masrohatun, *Loc.Cit.*, hal. 50.

<sup>7</sup> Dhany Putra Pratama, "Analisis Kebijakan Paradiplomasi Nusa Tenggara Barat Era Gubernur DR Zulkieflimansyah Tahun 2018" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), hal. 3.

hubungan luar negerinya pada sektor pariwisata daerah. Dalam hal ini, TGB memfokuskan pada kerja sama untuk membangun wisata halal dan investasi untuk membangun infrastruktur pendukungnya.

Kemudian, pada tahun 2018 kepemimpinan TGB digantikan oleh Zulkieflimansyah yang memimpin pada tahun 2018-2023. Pada masa Zulkieflimansyah ini fokus program paradiplomasi berubah dari pariwisata dan investasi menjadi pendidikan dan investasi untuk mendukung sektor pariwisata. Pemerintah NTB melaksanakan paradiplomasi melalui kerja sama dengan AirAsia untuk membuka rute penerbangan internasional ke Lombok, seperti dari Kuala Lumpur dan Perth, serta memfasilitasi investasi di bidang infrastruktur pariwisata dan pembangkit listrik oleh perusahaan Polandia. Sebagai imbalan, Pemerintah NTB memperoleh kuota bagi 1000 pelajar NTB untuk melanjutkan studi di tingkat sarjana, magister, dan doktoral di sejumlah negara Asia dan Eropa, termasuk Polandia, Malaysia, dan Cina. Inisiatif ini mendukung program 1000 Cendikia yang digagas oleh Zulkieflimansyah.<sup>8</sup>

Selain itu, pada masa Zulkieflimansyah ini dilakukan kerja sama *sister province* dengan beberapa daerah di luar negeri, salah satunya adalah dengan Northern Territory of Australia (NT). Secara ringkas dapat dipaparkan bahwa kerja sama antara NTB dan NT ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Beberapa alasannya telah diungkapkan oleh Zulkifliemansyah dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, alasan kerja sama tersebut dilakukan karena kedua daerah memiliki banyak kesamaan. Meskipun tidak dijelaskan kemiripan yang dimaksud, akan tetapi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Zulkifliemansyah menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kersama dengan NT karena daerah di Australia tersebut memiliki fasilitas yang bagus dan pengalaman yang mumpuni dalam pembangunan. Lebih lanjut, dia menyatakan NTB dapat belajar mengenai pengelolaan peternakan dan pertanian serta sektor lain, termasuk pariwisata dari NT.<sup>9</sup>

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kerja sama antara NTB dan NT didorong oleh sejumlah faktor yang mempertimbangkan potensi dan peluang kolaborasi antara kedua wilayah. Hubungan antara NTB dan NT terjalin kuat karena kesamaan dalam karakteristik geografis, budaya, serta tantangan pembangunan yang dihadapi. Kedua wilayah memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, NTB dan NT bertujuan untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor. Zulkifliemansyah menyatakan bahwa peran NT dalam pembangunan sangat bermanfaat bagi NTB. Karenanya, kerja sama ini diharapkan akan mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di NTB, terutama dengan mengikuti standar pelatihan yang diterapkan di Australia.<sup>10</sup>

Kerja sama dengan pemerintah di negara lain seperti ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah NTB agar dapat belajar guna kemajuan daerah ke depan. Hal ini terutama karena masih banyaknya masalah di berbagai sektor di NTB. Di sektor pendidikan, provinsi ini menghadapi masalah partisipasi pendidikan yang sangat minim, jauh dari target capaian sebesar 80,72 persen pada tahun 2021. Data terakhir

---

<sup>9</sup> Harian Noris Saputra, "NTB dan Australia Utara Jalin Sister City, Begini Targetnya," 2023 <<https://bali.bisnis.com/>> [diakses 5 Januari 2024].

<sup>10</sup> Pemprov NTB, "Pemprov NTB dan Australua Utara Semakin Mesra: Gubernur Bang Zul Tandatangani MoU Kerja sama," 2023.

pada tahun 2021 menunjukkan capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) untuk anak usia 3-6 tahun hanya sebesar 41,01 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka APK PAUD anak perempuan lebih tinggi sedikit dibandingkan anak laki-laki, yaitu masing-masing 41,73 persen dan 40,33 persen.

APK merupakan angka yang menunjukkan partisipasi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu. Di NTB, nilai APK ini cenderung mengalami penurunan seiring meningkatnya jenjang pendidikan, misalnya, APK untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 107,23 persen. Nilai APK ini kemudian turun di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masing-masing 93,72 persen dan 93,75 persen. Nilai ini pun berbeda di daerah perkotaan dan perdesaan, berbeda pula pada tingkat ekonomi keluarga. Kondisi ini kemudian diperburuk oleh rendahnya fasilitas sekolah di beberapa daerah. Dari data tahun 2021 diketahui bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki sekolah terbanyak, yaitu 479, disusul Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 347, dan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 335. Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara menempati urutan terendah dengan jumlah sekolah hanya 81 sekolah.<sup>11</sup>

Kondisi ini membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia di NTB. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, sampai menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di NTB masih tertinggal dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya

---

<sup>11</sup> LPW NTB, "Kondisi Pendidikan di NTB: Jumlah Sekolah dan Guru," 2021 <<https://www.lpwntb.or.id/>> [diakses 5 Januari 2024].

manusia menjadi pekerjaan utama bagi Pemerintah NTB. Dia bahkan mengungkap data dari APK jenjang perguruan tinggi di NTB sangat minim, yaitu hanya 18 persen.<sup>12</sup> Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB hanya mampu menempati posisi 26 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.<sup>13</sup>

Akibat dari kondisi ini juga terlihat dari banyaknya pengangguran di NTB. Sekarang tercatat ada lebih dari 100.000 pengangguran dari berbagai latar belakang pendidikan di provinsi ini, termasuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diharapkan cepat diserap oleh dunia kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari semua angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,92 persen yang berarti masih ada sekira 109.000 pengangguran dengan latar belakang pendidikan yang beragam di NTB.<sup>14</sup>

Pada gilirannya, kondisi ini juga mengakibatkan tantangan di sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan NTB. Hal ini terlihat dari pelayanan pariwisata NTB yang dinilai masih kurang ramah turis. Beberapa masalah yang sering muncul terkait rendahnya sumber daya manusia pariwisata di provinsi ini adalah adanya aksi menyembunyikan kamar, mengerek harga hingga batas tertinggi dan tindakan pelecehan dalam bentuk *catcalling* di tempat wisata. Hal ini kemudian diperparah dengan masih maraknya tindakan kriminal di Lombok.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> “Ma’ruf Amin: Kualitas SDM di NTB Masih Tertinggal,” 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/>> [diakses 5 Januari 2024].

<sup>13</sup> Hayatun Sofian, “IPM NTB Diposisi 26 Menggunakan SP2020,” 2023 <<https://www.rri.co.id/>> [diakses 5 Januari 2024].

<sup>14</sup> Ismail Zakaria, “Ketidakcocokan Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Jadi Permasalahan di NTB,” 2022 <<https://www.kompas.id/>> [diakses 5 Januari 2024].

<sup>15</sup> Tim Detik, “Lombok Masih Berkutat dengan Masalah Hotel dan Tak Ramah Turis,” 2022 <<https://travel.detik.com/>> [diakses 5 Januari 2024].

Guna membenahi semua masalah seperti yang dijelaskan di atas, Pemerintah NTB memiliki inisiatif untuk bekerja sama dengan NT agar dapat belajar, bahkan dibantu dalam membangun NTB. Hal ini karena kerja sama antara NTB dan NT menawarkan sejumlah manfaat strategis yang berpotensi mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kedua wilayah tersebut. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dengan menyediakan inovasi dan solusi yang relevan bagi kebutuhan lokal. Pengembangan kapasitas lokal melalui program-program penelitian yang dilakukan oleh NT juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan pendidikan dan penelitian di Nusa Tenggara Barat, yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia demi kelancaran pembangunan sektor pariwisata.<sup>16</sup>

Rencana kerja sama antara kedua daerah ini kemudian diwujudkan dengan penandatanganan Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent* (LoI) secara virtual antara Pemerintah NTB dan Pemerintah NT di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin, 28 Maret 2022. Kerja sama yang dilakukan ini akan fokus di berbagai bidang seperti pariwisata, pengembangan ekonomi, pengembangan sektor peternakan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.<sup>17</sup> Kerja sama ini pun terus berlanjut hingga ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 10 Juli 2023.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pemprov NTB, “Pemprov NTB dan Australua Utara Semakin Mesra: Gubernur Bang Zul Tandatangani MoU Kerja sama.” *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Bidang IKP, “Provinsi NTB Jalin Kerja sama Sister Province dengan Provinsi Northern Territory of Australia” <<https://www.ntbprov.go.id/>> [diakses 13 November 2023].

<sup>18</sup> Anjas Andita, “Pemprov NTB Perkuat Kerja Sama dengan Northern Territory,” 2023 <<https://lombokpost.jawapos.com/>> [diakses 25 November 2024].

Dipilihnya beberapa bidang kerja sama di atas tentu bukan tanpa alasan. Kedua daerah memang memiliki potensi yang besar di bidang-bidang tersebut, terutama pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata merupakan sektor unggulan bagi kedua daerah, dengan karakteristik yang saling melengkapi berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah. NTB menonjolkan keindahan wisata bahari, seperti Gili Trawangan, Mandalika, dan Gunung Rinjani, yang menarik wisatawan melalui potensi pantai, ekosistem laut, serta budaya lokal Suku Sasak. Sementara itu, NT mengandalkan wisata alam liar dan budaya Aborigin dengan destinasi ikonik seperti Taman Nasional Kakadu, Uluru, dan Katherine Gorge.

Dengan potensi seperti yang disebutkan di atas, sektor pariwisata di NTB bahkan menempati posisi teratas yang menyumbang pertumbuhan ekonomi NTB setelah pertambangan.<sup>19</sup> Pariwisata sendiri memberikan kontribusi langsung sekitar 2,5% terhadap *Gross State Product* (GSP) dan menciptakan lebih dari 12.500 lapangan pekerjaan yang mendukung perekonomian lokal. Selain itu, sektor ini berperan penting dalam mendiversifikasi ekonomi NT dengan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.<sup>20</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua daerah menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan identitas budaya masing-masing di tingkat internasional. Oleh karena itu, melalui kerja sama ini keduanya dapat belajar bersama dengan saling membagi pengalaman, bahkan saling membantu pengembangan pariwisata di kedua daerah.

---

<sup>19</sup> Dinas Pariwisata NTB, *Laporan Tahunan Dinas Pariwisata NTB Tahun 2021* (Dinas Pariwisata NTB, 2021).

<sup>20</sup> Tourism NT, "How Tourism Boosts Northern Territory's Economy," 2022 <<https://tourismnt.com.au/>> [diakses 15 Januari 2025].



Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk membahas salah satu dari bidang kerja sama *sister province* antara NTB dan NT ini, yaitu sektor pariwisata. Namun, peneliti tidak akan sekedar membahas mengenai kemajuan wisata di kedua daerah, melainkan membahas tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah NTB dalam kerja sama dengan Pemerintah NT di sektor pariwisata, utamanya pada tahap inisiasi. Hal ini karena meskipun memiliki potensi besar, peneliti memandang kerja sama NTB dan NT ini juga akan menghadapi sejumlah tantangan, utamanya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan infrastruktur mengingat NTB masih sangat kurang dalam dua masalah ini. Hal inilah yang akan coba didiskusikan dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti kemudian mengajukan satu pertanyaan yang akan didiskusikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah NTB pada inisiasi kerja sama *sister province* yang dijalin dengan Pemerintah NT di bidang pariwisata?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah NTB pada kerja sama *sister province* yang dijalin dengan Pemerintah NT di bidang pariwisata, utamanya pada tahap inisiasi.

## 1.3.2 Manfaat Penelitian

### 1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional, khususnya dalam topik kerja sama antara dua negara dalam kerangka *sister province*.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan dalam kerja sama dua provinsi yang berbeda negara dalam berbagai bidang, terutama di bidang pariwisata.
3. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur terdahulu bagi para mahasiswa hubungan internasional dan peneliti yang memiliki minat pada topik kajian yang sama.

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah NTB untuk mengoptimalkan kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah NT.

## 1.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai topik ini. Penelitian **pertama** yang digunakan oleh peneliti yaitu artikel jurnal berjudul

***Sektor Pariwisata Melalui Kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory Australia Sebagai Sister Province Berkelanjutan*** oleh Pijar Syiffa Aditama, Sultan Naufal Muzakki, dan Muhammad Revaldo Alwi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya sektor pariwisata di Provinsi NTB, yang semakin menjadi sorotan dalam kerjasama paradiplomasi antara kedua pihak, sejalan dengan tren pariwisata saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta keuntungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Konsep dan praktik ini tentunya akan menjadi fokus dalam pembahasan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama paradiplomasi antara NTB dan NT memperlihatkan peran penting aktor subnasional dalam hubungan internasional yang berkelanjutan. Dengan menggunakan konsep *sister province*, kedua wilayah tersebut telah menjalin berbagai kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan penekanan pada pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Penandatanganan dokumen resmi MoU dan LoI menjadi dasar yang memperkuat kemitraan antara NTB dan NT dalam jangka waktu yang panjang.<sup>21</sup>

**Penelitian kedua** adalah jurnal ilmiah yang berjudul ***Implementation of The Provincial Government's Authority to Carry out Sister Province Cooperation in***

---

<sup>21</sup> Pijar Syiffa Aditama, Sultan Naufal Muzakki, dan Muhammad Revaldo Alwi, "Sektor Pariwisata Melalui Kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory Australia Sebagai Sister Province Berkelanjutan," *Jurnal Interaktif*, 1.1 (2023).

***The Perspective of Internationa and Nationaal Law Case Study: Sister Province Cooperation between Province of NTB and Northern Province of Australia*** oleh

**Amartyanto, Muh. Risnain dan Diva Pitaloka.** Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis posisi serta kekurangan LoI antara Pemerintah NTB dan Pemerintah NT mengenai kerjasama *sister province* dari sudut pandang hukum internasional dan hukum domestik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pelaksanaan wewenang pemerintah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam LoI dalam konteks perjanjian *sister province* menurut hukum internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris.

Hasil penelitian ini adalah penerapan wewenang yang telah dilakukan oleh Pemerintah NTB bersama dengan Pemerintah NT dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan antar *sister province* mencakup langkah-langkah penjajakan, penyusunan dokumen, dan negosiasi. Meskipun belum semua tahapan selesai dilaksanakan, kesepakatan telah dicapai pada fase negosiasi. Proses penandatanganan dan implementasi perjanjian masih perlu dilakukan untuk merealisasikan kerjasama tersebut.<sup>22</sup>

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pijar Syiffa Aditama, Sultan Naufal Muzakki, dan Muhammad Revaldo Alwi, <i>Sektor</i>	Penelitian kualitatif-deskriptif.	Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama paradiplomasi antara NTB dan NT memperlihatkan

<sup>22</sup> Amartyanto, Muh. Risnain, dan Diva Pitaloka, "Implementation of The Provincial Government's Authority to Carry out Sister Province Coopertion in The Perspective of Internationa and Nationaal Law Case Study: Sister Province Cooperation between Province of NTB and Northern Province of Australia," *Mataram Journal of International Law*, 1.1 (2023), hal. 79–86.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Pariwisata Melalui Kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory Australia Sebagai Sister Province Berkelanjutan</i></p>		<p>peran penting aktor subnasional dalam hubungan internasional yang berkelanjutan. Dengan menggunakan konsep <i>sister province</i>, kedua wilayah tersebut telah menjalin berbagai kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan penekanan pada pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Penandatanganan dokumen resmi MoU dan LoI menjadi dasar yang memperkuat kemitraan antara NTB dan NT dalam jangka waktu yang Panjang.</p>
2	<p>Amartyanto, Muh. Risnain, Diva Pitaloka, <i>Implementation of The Provincial Government's Authority to Carry out Sister Province Coopertion in The Perspective of Internationa and</i></p>	<p>Penelitian kualitatif, normatif-empiris</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah penerapan wewenang yang telah dilakukan oleh Pemerintah NTB bersama dengan Pemerintah NT dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan antar <i>sister province</i></p>

No	Penulis dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Nationaal Law Case Study: Sister Province Cooperation between Province of NTB and Northern Province of Australia</i>		mencakup langkah-langkah peninjauan, penyusunan dokumen, dan negosiasi. Meskipun belum semua tahapan selesai dilaksanakan, kesepakatan telah dicapai pada fase negosiasi. Proses penandatanganan dan implementasi perjanjian masih perlu dilakukan untuk merealisasikan kerjasama tersebut.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

## 1.5 Kerangka Konsep

### 1.5.1 Paradiplomasi dan Politik Paradiplomasi

Sebelum membahas apa yang dimaksud sebagai ‘politik paradiplomasi,’ ada baiknya untuk memahami konsep paradiplomasi terlebih dahulu. Paradiplomasi sebagai sebuah konsep merujuk pada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh entitas *sub-state*, dalam hal ini bisa pemerintah daerah, yang dengan kapasitas mereka melakukan hubungan internasional dengan pemerintah negara lain demi kepentingan mereka secara spesifik. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam perdebatan yang berlangsung antara para ilmuwan asal Basque, Panayotis pada tahun 1980-an. Secara bahasa, istilah paradiplomasi berasal dari penggabungan dari dua kata, yaitu ‘*parallel*’ dan ‘*diplomacy*’ yang jika digabungkan menjadi

'paradiplomacy' dan dimaknai sebagai '*the foreign policy of non-central governments.*' Paradiplomacy juga bisa disebut sebagai *micro-diplomacy*.<sup>23</sup>

Munculnya paradiplomasi ini pertama kali di negara-negara maju yang terdapat di Eropa. Menurut para sarjana, misalnya Stefan Wolff, kemunculan paradiplomasi sebagai fenomena mengindikasikan adanya perubahan pemikiran yang paling mendasar tentang kedaulatan negara secara fundamental. Dalam hal ini, sistem Westphalia yang meletakkan kedaulatan negara secara penuh pada pemerintah pusat dengan sukarela dibagi dengan pemerintah daerah sebagai *sub-state* dalam aktivitas internasionalnya.<sup>24</sup> Lebih lanjut, dijelaskan bahwa di negara-negara maju terdapat setidaknya dua kecenderungan pembagian kedaulatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aktivitas internasional, yaitu bersifat kooperatif seperti yang dipraktekkan oleh Flanders, Wallonia, dan Bavaria; dan bersifat konfliktual seperti Skotlandia dan Catalunya.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Effendi<sup>26</sup> menjelaskan dalam paradiplomasi terdapat tiga tingkatan dalam implementasinya. *Pertama*, tingkat ini berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Pada tingkatan ini, kegiatan paradiplomasi digunakan sebagai saluran untuk menunjukkan ke dunia internasional mengenai potensi-potensi yang ada di sebuah daerah untuk menarik investasi asing dengan mengundang perusahaan-perusahaan internasional dan juga membuka pasar ekspor. *Kedua*, pada tingkat kedua berhubungan dengan kerja sama budaya, pendidikan, teknologi, dan

---

<sup>23</sup> Takdir Ali Mukti, "Paradiplomacy : The Rise of Local Actor in International Fora," *The Politics*, 1.1 (2015), hal. 85–94 (hal. 85).

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 86

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Effendi, "Review of Sister Province between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan," hal. 103.

lain-lain. Kegiatan paradiplomasi pada tingkatan ini mulai tidak hanya sekedar fokus pada kepentingan ekonomi, akan tetapi telah berkembang menjadi kegiatan yang multidimensi. Terakhir, *ketiga*, tingkatan terakhir ini berkaitan dengan pertimbangan politik. Pada tingkat ini, paradiplomasi digunakan sebagai saluran untuk menunjukkan eksistensi sebagai entitas khusus dan berdasarkan identitas.

Lebih lanjut, Effendi<sup>27</sup> menjelaskan bagaimana pentingnya paradiplomasi di negara-negara berkembang. Menurutnya paradiplomasi memberikan implikasi penting di negara-negara berkembang. Setidaknya ada tiga implikasi yang dimaksud: *pertama*, aktivitas paradiplomasi memberikan banyak pilihan bagi pemerintah daerah dalam hal pembangunan ekonomi, pertukaran budaya, teknologi, dan pengakuan politik. Dalam hal ini, pemerintah daerah di setiap negara memiliki kesempatan menjalin hubungan satu sama lain berdasarkan persahabatan atau pertukaran potensi lokal yang akan menghasilkan manfaat bersama.

*Kedua*, aktivitas paradiplomasi memerlukan penyesuaian di setiap tingkat lokal. Hal ini berarti memerlukan struktur yang memberikan akses dari dunia internasional untuk masuk dan menjalin hubungan, termasuk ketersediaan saluran ke jejaring internasional yang harus dibuat di setiap pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat biasanya membatasi saluran ini dengan alasan persatuan nasional. *Ketiga*, aktivitas paradiplomasi memberikan kesempatan untuk meningkatkan demokrasi di mana partisipasi masyarakat menjadi penting dalam hubungan internasional. Hal ini memungkinkan karena kerja sama paradiplomasi akan membuka peluang bagi masyarakat di suatu daerah untuk menjalin hubungan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 104.



dengan masyarakat di pemerintah daerah asing lainnya sehingga peluang pertukaran nilai menjadi lebih luas.<sup>28</sup>

Dengan demikian, paradiplomasi dapat dipahami sebagai pembagian kedaulatan oleh pemerintah pusat ke pada *sub-state* untuk melakukan kegiatan diplomasi dengan pemerintah lain yang setingkat di negara lain. Paradiplomasi, dalam konteks berbagi kedaulatan, memerlukan perumusan kebijakan yang cermat untuk mendukung pembangunan nasional. Kebijakan inilah yang dimaksud sebagai 'politik paradiplomasi.' Mukti,<sup>29</sup> dengan meminjam definisi politik hukum oleh Mahfud MD, mendefinisikan politik paradiplomasi sebagai kebijakan resmi pemerintah terkait paradiplomasi. Kebijakan ini mencakup pengaturan dan pelaksanaan praktik paradiplomasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional secara efektif. Dengan demikian, politik paradiplomasi berfungsi sebagai kerangka strategis dalam membangun hubungan internasional yang melibatkan pemerintah daerah tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Kebijakan yang dimaksud tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang paradiplomasi. Di Indonesia, landasan utama politik paradiplomasi pemerintah Indonesia berakar pada Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai produk peraturan teknis. Setelah UUD, regulasi spesifik yang mengatur hubungan luar negeri mencakup beberapa undang-undang dan peraturan. Di antaranya adalah UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 Tahun 2000

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Takdir Ali Mukti, *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (The Phinisi Press, 2020), XI, hal. 14.

tentang Perjanjian Internasional, serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, sejumlah peraturan teknis juga memperkuat dasar hukum paradiplomasi, seperti Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri juga berperan penting, termasuk Nomor 3 Tahun 2008 yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Kombinasi peraturan ini menjadi panduan dalam implementasi politik paradiplomasi di Indonesia.<sup>30</sup>

Dalam konteks politik paradiplomasi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Pasal 1 poin 4 dan 5, mengatur dua jenis kerja sama yang mencakup aktivitas paradiplomasi di Indonesia. Pertama, Kerja Sama Daerah dengan Daerah di Luar Negeri (KSDPL) melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Kedua, Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) mencakup kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga internasional dalam rangka mendukung kewenangan daerah dan percepatan pelayanan publik.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 17.

Menurut Mukti,<sup>32</sup> ada tiga tipologi politik paradiplomasi, yaitu isolatif, konservatif, dan progresif. Setiap tipe memiliki sejumlah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan atau politik luar negeri suatu negara. Indikator-indikator ini membantu mengenali pendekatan yang diambil negara dalam menjalankan praktik paradiplomasi. Masing-masing tipe dan indikatornya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 2 Tipologi Politik Paradiplomasi**

<b>Tipe</b>	<b>Isolatif</b>	<b>Konservatif</b>	<b>Progresif</b>
<b><i>Kebijakan Luar Negeri</i></b>	Ada di tingkat pusat	Ada di tingkat pusat	Ada di tingkat pusat
<b><i>Peran Diplomatik</i></b>	Tidak ada otoritas inisiatif kerja sama luar negeri, namun penugasan dari pusat	Ada otoritas inisiatif kerja sama luar negeri, namun sepenuhnya dikontrol oleh pusat	Ada otoritas inisiatif kerja sama, dan sebagian aktivitas diplomasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah regional (paradiplomasi)
<b><i>Kantor Perwakilan di Luar Negeri</i></b>	Hanya ada kantor perwakilan dari pemerintah pusat	Hanya ada kantor perwakilan dari pemerintah pusat	Pemerintah daerah dengan kriteria tertentu dapat membuka perwakilan di luar negeri (person/kantor)
<b><i>Pembuatan Dokumen Kerja Sama dengan Pihak Asing</i></b>	Dengan surat mandat dari pusat ( <i>full power</i> )	Dengan surat mandat dari pusat ( <i>full power</i> )	Tidak memerlukan surat mandat, tapi koordinatif dengan pusat

Sumber: Mukti, 2020

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pendekatan kebijakan luar negeri suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe: isolatif, konservatif, dan progresif. Ketiga tipe ini dibedakan berdasarkan beberapa indikator, termasuk kebijakan luar negeri, peran diplomatik, keberadaan kantor perwakilan di luar

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 40.

negeri, dan mekanisme pembuatan dokumen kerja sama dengan pihak asing. Pada tipe isolatif, kebijakan luar negeri sepenuhnya berada di tingkat pusat tanpa otoritas inisiatif dari pemerintah daerah. Peran diplomatik daerah terbatas hanya pada penugasan dari pusat. Kantor perwakilan luar negeri juga hanya dikelola oleh pemerintah pusat, dan segala bentuk kerja sama dengan pihak asing harus melalui surat mandat yang diberikan oleh pusat (*full power*).

Tipe konservatif menunjukkan sedikit perkembangan, di mana pemerintah daerah diberikan otoritas untuk menginisiasi kerja sama luar negeri, namun tetap dalam kontrol penuh pemerintah pusat. Meskipun demikian, kantor perwakilan luar negeri masih terbatas pada yang dikelola pemerintah pusat, dan pembuatan dokumen kerja sama juga tetap memerlukan surat mandat dari pusat.

Sementara itu, pada tipe progresif, terdapat pergeseran yang lebih signifikan. Pemerintah daerah diberikan otoritas untuk menginisiasi kerja sama luar negeri, termasuk melaksanakan beberapa aktivitas diplomasi melalui mekanisme paradiplomasi. Dalam kriteria tertentu, pemerintah daerah bahkan dapat membuka perwakilan di luar negeri, baik dalam bentuk personel maupun kantor. Pembuatan dokumen kerja sama dengan pihak asing tidak lagi membutuhkan surat mandat dari pusat, tetapi harus tetap dilakukan secara koordinatif dengan pemerintah pusat.

Menurut Mukti,<sup>33</sup> jika mencermati berbagai regulasi yang mengatur tentang paradiplomasi, maka tipologi politik paradiplomasi yang diadopsi oleh Indonesia bisa dikatakan adalah tipe konservatif. Hal ini terlihat jelas dari pengaturan paradiplomasi oleh pemerintah RI yang secara eksplisit menunjukkan bahwa

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 56.

kebijakan atau politik paradiplomasi di Indonesia bersifat konservatif. Berbagai indikator mendukung klasifikasi ini, terutama adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah yang sangat ketat dalam menjalankan aktivitas paradiplomasi.

Tipologi yang telah dijelaskan di atas akan digunakan sebagai kerangka untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Namun demikian, tidak semua indikator dari setiap tipologi akan dibahas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kerja sama antara NTB dan NT sejauh informasi awal yang dikumpulkan peneliti hanya mencakup pembuatan dokumen kerja sama berupa MoU. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada indikator keempat, yaitu pembuatan dokumen kerja sama dengan pihak asing, dengan penekanan pada tantangan yang muncul dalam proses penyusunan MoU kerja sama *sister province* antara kedua wilayah tersebut, khususnya dalam bidang pariwisata. Pembahasan akan dimulai dengan melakukan analisis terhadap regulasi yang mengatur paradiplomasi di Indonesia, lalu diikuti dengan penjabaran mengenai beberapa tantangan dalam inisiasi kerja sama tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Paradigma penelitian kualitatif secara sederhana dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan tanpa mengolah angka dengan menggunakan prosedur statistik. Anderson<sup>34</sup> menjelaskan paradigma kualitatif sebagai serangkaian

---

<sup>34</sup> Dalam Moh. Mujibur Rohman dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, ed. oleh Hengki Fernanda (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), hal. 3.

kegiatan penelitian, baik dalam hal pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi data secara keseluruhan dilakukan tanpa mereduksi data-data yang telah dikumpulkan menjadi angka. Oleh karena itu, informasi dalam penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk tabulasi-tabulasi angka, akan tetapi dalam bentuk kalimat-kalimat dan diterangkan secara verbal.<sup>35</sup>

Sementara itu, jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau sebuah deskripsi dari suatu fenomena tertentu secara objektif.<sup>36</sup> Lebih lanjut dijelaskan, studi yang menggunakan jenis penelitian ini biasanya masalah penelitian yang akan dibahas sudah terang, akan tetapi perlu penegasan terhadap konsep-konsep yang akan digunakan. Sejalan dengan namanya, penelitian jenis ini juga dirumuskan dengan metode deskriptif, meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang telah dikumpulkan.

### **1.6.2 Metode Analisis**

Menurut Purba dan Simanjuntak<sup>37</sup> pemilihan teknik analisis data dapat ditentukan sesuka hati oleh peneliti. Namun, menurut mereka sebelum menentukan teknik atau metode analisis data, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu data apa yang hendak dikumpulkan. Mengetahui jenis data akan menentukan teknik analisis data yang akan dipilih. Dalam hal ini, mereka membagi teknik analisis data menjadi dua: 1) teknik analisis non-statistik; dan 2) teknik analisis statistik. Teknik analisis non-statistik merupakan teknik yang biasa digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang tidak dirubah menjadi data kuantitatif berbentuk angka. Sementara

---

<sup>35</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (SADIA, 2011), hal. 23.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 154.

teknik analisis statistik sebaliknya digunakan untuk menganalisis data kuantitatif berbentuk angka. Oleh karena penelitian ini akan mengumpulkan jenis data kualitatif sesuai dengan paradigma yang digunakan, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis non-statistik.

Dalam penelitian ini, secara garis besar peneliti melakukan analisis data dalam dua proses, yaitu analisis sebelum ke lapangan dan analisis selama penelitian di lapangan. Dalam analisis sebelum ke lapangan, analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data sekunder yang memuat data relevan dengan topik penelitian. Kemudian, dalam analisis data di lapangan, peneliti akan mengacu pada model Miles dan Huberman. Analisis data menurut model Miles dan Huberman ini terdiri dari tiga proses: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Masing-masing dari tiga proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti perlu dicatat secara rinci dan teliti karena jumlahnya yang mungkin begitu kompleks. Dalam konteks inilah reduksi data diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti sesuai dengan yang dipaparkan dalam desain penelitiannya merupakan landasan terpenting dalam mereduksi data. Karena itu, untuk mereduksi data sangat penting bagi peneliti untuk menentukan fokus penelitian secara cermat terlebih dahulu.

## 2) Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam proses analisis data adalah melakukan penyajian data. Melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk dapat mengetahui fenomena yang terjadi dan lebih terencana dalam menyajikan hasil data yang berbentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya diuraikan dalam bentuk kata-kata. Hal inilah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

## 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir yang perlu dilakukan dalam analisis data model ini adalah memverifikasi dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan pada data-data dan bukti-bukti yang telah ditemukan dan diakui kebenarannya. Verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan di lapangan biasanya akan menghasilkan data yang lebih kredibel dibandingkan kesimpulan tahap awal sebelum penelitian dilakukan.

### 1.6.3 Tingkat Analisis

Tingkat analisis pada penelitian ini berada di level negara, yaitu antara Indonesia dan Australia melalui dua pemerintah daerah mereka yang setingkat, yaitu Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah NT yang juga setingkat provinsi melalui kerangka *sister province*.

### 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mencoba mendiskusikan kerja sama *sister province* antara Pemerintah NTB dan Pemerintah NT. Kerja sama yang baru terjalin ini fokus di berbagai bidang seperti pariwisata, pengembangan ekonomi, pengembangan sektor



peternakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena luasnya bidang kerja sama *sister province* antara dua provinsi ini, maka peneliti membatasi materi penelitian hanya di bidang pariwisata mengingat pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi NTB dan NT sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain penelitian ini. Kemudian, peneliti juga membatasi waktu penelitian dari sejak kerja sama ini sedang dalam tahap penajakan sampai penelitian ini akan dilakukan.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dianggap sebagai roda penggerak penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif atau untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Dalam melakukan pengumpulan data ini terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan, mulai dari wawancara, *forum group discussion*, observasi, dokumentasi, angket dan kuesioner. Teknik pengumpulan data tidak lain merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data yang diolah secara kualitatif maupun kuantitatif, kemudian disusun secara sistematis. Peneliti perlu untuk memilih teknik pengumpulan data yang tepat karena kebenaran data yang dikumpulkan akan sangat bergantung pada cara mendapatkan data tersebut. Penelitian ini sendiri akan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi tidak terstruktur dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing teknik:

a. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan tertentu. Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi yang tidak didapatkan melalui teknik observasi. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah ada dan tidaknya panduan dan daftar pertanyaan yang disiapkan selama wawancara. Wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, sebaliknya wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Penelitian ini sendiri akan menggunakan wawancara tidak terstruktur tanpa menyiapkan daftar pertanyaan.

Lebih lanjut dijelaskan, wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan netral, mendengarkan tanggapan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan serta penyelidikan lanjutan berdasarkan tanggapan tersebut. Dengan kata lain, peneliti mendiskusikan suatu topik dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban singkat dari orang yang diwawancarai, lalu diskusi akan berjalan berdasarkan informasi dan tanggapan sebelumnya dari informan.<sup>38</sup>

Dalam kaitannya dengan topik dalam penelitian ini, peneliti telah memilih beberapa nama untuk diwawancarai. Berikut beberapa informan yang rencananya akan diwawancarai oleh peneliti:

---

<sup>38</sup> Rohman dkk., *Op.Cit.*, hal. 139.

**Tabel 1. 3 Nama-Nama Informan**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
H. Lalu Gita Ariadi	Sekretaris Daerah Provinsi NTB
Subhan Hasan	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTB
Agus Adi	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata NTB
Auliya Rahman	Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata Dinas Pariwisata NTB
Ririn Swandhayani	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata NTB
Kartini	Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata NTB

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Alasan dipilihnya nama-nama di atas sebagai informan adalah karena mereka merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah NTB yang memiliki peran penting dalam berbagai proses yang terkait dengan kerja sama *sister province* antara NTB dan NT. Keterlibatan mereka dalam inisiasi hingga pelaksanaan kerja sama menjadikan mereka sumber informasi utama yang relevan untuk memberikan wawasan mendalam terkait kebijakan, tantangan, dan peluang dalam kerja sama ini. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b. Observasi tidak terstruktur

Observasi disebut juga pengamatan merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan karena kemudahannya. Observasi dilakukan dengan mengamati objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang didiskusikan. Observasi dapat dilakukan dalam tiga bentuk: observasi partisipan, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.

Observasi partisipan merupakan pengamatan yang dilakukan dengan terlibat dalam kegiatan informan. Observasi tidak terstruktur sendiri merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan panduan dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan informan yang diamati. Terakhir, observasi kelompok merupakan pengamatan dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Penelitian ini akan menggunakan observasi tidak terstruktur karena bentuk pengamatan ini dirasa cukup digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Selain itu, bentuk observasi ini juga tidak membutuhkan banyak waktu untuk dilakukan.<sup>39</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumen seperti diketahui merupakan sumber data berupa tulisan, film, gambar, karya monumental dan lain-lain yang dapat memberikan informasi. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dari sumber non-manusia. Salah satu alasan untuk menggunakan teknik ini adalah karena dinilai ekonomis, mudah tersedia, stabil keakuratannya, termasuk pernyataan yang legal dan memenuhi akuntabilitas. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan seluruh data relevan berupa dokumen yang telah tersedia, terutama dokumen resmi, baik dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan, rekaman hasil rapat, dan keputusan pimpinan; dan dokumen eksternal berupa lembaga sosial, majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 142.

## 1.7 Argumen Pokok

Paradiplomasi memang memainkan peran penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan internasional dan mengembangkan sektor ekonomi strategis, seperti pariwisata. Kerja sama *sister province* seperti yang dilakukan oleh NTB dan NT berpotensi besar dalam memperkuat sektor pariwisata NTB melalui transfer keahlian, promosi bersama, dan peningkatan kapasitas lokal. Namun, kerja sama seperti ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk hambatan regulasi, budaya, keterbatasan sumber daya lokal, dan perbedaan prioritas pembangunan serta tantangan lainnya.

Oleh karena itu, meneliti tantangan-tantangan ini menjadi penting untuk memastikan kerja sama yang efektif, mengoptimalkan manfaat ekonomi lokal, dan memperkuat sumber daya manusia dalam bidang pariwisata di NTB. Pemahaman terhadap tantangan ini akan memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam literatur paradiplomasi, serta menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kolaborasi dengan daerah lain di luar negeri.

## 1.8 Struktur Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari empat bab dan masing-masing bab dari penelitian ini akan berisi pembahasan berbeda yang merupakan satu kesatuan. Berikut isi dari masing-masing bab:

**Tabel 1. 4 Struktur Penulisan**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.2 Manfaat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.2.1 Manfaat Akademis</li> <li>1.3.2.2 Manfaat Praktis</li> </ul> </li> <li>1.4 Penelitian Terdahulu</li> <li>1.5 Kerangka Konsep <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5.1 Paradiplomasi</li> </ul> </li> <li>1.6 Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>1.6.1 Jenis Penelitian</li> <li>1.6.2 Metode Analisis</li> <li>1.6.3 Tingkat Analisis</li> <li>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</li> <li>1.6.5 Teknik Pengumpulan Data</li> </ul> </li> <li>1.7 Argumen Pokok</li> <li>1.8 Struktur Penulisan</li> </ul>
<b>BAB II</b>	<p><b>PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i> DENGAN NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Kondisi Umum Wilayah Provinsi NTB <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 Letak dan Luas Wilayah</li> <li>2.1.2 Kondisi Geografis</li> <li>2.1.3 Kondisi Demografis</li> <li>2.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi</li> </ul> </li> <li>2.2 Gambaran Pariwisata di Provinsi NTB <ul style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Beberapa Potensi Pariwisata di Provinsi NTB</li> <li>2.2.2 Jumlah Akomodasi Pariwisata di NTB</li> </ul> </li> <li>2.3 Kerja Sama <i>Sister Province</i> Antara Provinsi NTB dan Pemerintah Setingkat di Negara lain <ul style="list-style-type: none"> <li>2.3.1 Kerja Sama dengan Bukhara, Uzbekistan</li> <li>2.3.2 Kerja Sama dengan Kujawsko-Promorskie, Polandia</li> <li>2.3.3 Kerja Sama dengan Zhejiang, Tiongkok</li> <li>2.3.4 Kerja Sama dengan Northern Territory of Australia</li> </ul> </li> </ul>
<b>BAB III</b>	<p><b>TANTANGAN DALAM KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i> ANTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA DI BIDANG PARIWISATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Proses Inisiasi Kerja Sama <i>Sister Province</i> antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory of Australia di Bidang Pariwisata</li> <li>3.2 Bentuk Kerja Sama <i>Sister Province</i> Antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory of Australia di Bidang Pariwisata</li> <li>3.3 Tantangan dalam Kerja Sama Antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory of Australia di Bidang Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>3.3.1 Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antar Lembaga</li> <li>3.3.2 Regulasi yang Belum Memadai</li> <li>3.3.3 Perbedaan dalam Sumber Daya Manusia</li> </ul> </li> </ul>

	<p>3.3.4 Infrastruktur dan Amenitas yang Belum Memadai</p> <p>3.3.5 Aksesibilitas yang Terbatas</p> <p>3.3.6 Keterbatasan Promosi dan Pemasaran</p> <p>3.3.7 Keterbatasan Kelembagaan dan Prosedur Internal</p> <p>3.3.8 Kesulitan dalam Meniru Model Pengelolaan Pariwisata</p> <p>3.3.9 Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan</p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>PENUTUP</b></p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

